



Jurnal Bakaba
Volume 8,, Nomor 2, Bulan Desember, 2018

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Budi Juliardi

Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 2, Desember 2018

Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Untuk Mengutip Artikel ini :

Budi Juliardi, 2018. Partisipasi Politik Masyarakat nelayan Sungai Limau Dalam Pemilu Legislatif Tahun 1999. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 2, bulan Desember, 2018: 9-xx.

Copyright © 2017, Jurnal Bakaba

ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Sumatera Barat



Partisipasi politik Masyarakat Nelayan Sungai Limau Dalam Pemilu Legislatif Tahun 1999

Budi Juliardi¹

¹Dosen Prodi Pendidikan PKN STKIP PGRI Sumatera Barat

Email : author1@email.com (Cambria 10)

ABSTRACT

This research aims to see the level of political participation of fishing communities in the District of Sungai Limau in the 1999 legislative elections, namely in Jorong Pasir Baru and Sungai Sirah. This goal is achieved through a qualitative approach by following the steps that are applied Milles and Huberman. Informants determined by using the snow ball sampling techniques that include fishing (fishing boat owners and fishermen, workers), wife of fishermen, wali jorong, as well as public figures. The study findings suggest that the level of political participation of fishing communities in the legislative elections Sungai Limau in 1999 are higher when compared with the level of political participation at before election period, namely 96.2% in Sungai Sirah and 94.12% in Pasir Baru or above 90% . Sungai Limau fishing communities take advantage of the freedom of choice provided by Era Reformasi to choose according to their wishes.

Keywords: political participation, fishing communities, legislative elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini, pemilu yang diadakan secara nasional terbagi menjadi tiga, yaitu pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pemilu kepala daerah (pilkada). Pemilu legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan mengisi keanggotaan MPR di tingkat pusat serta DPRD di tingkat daerah. Pemilihan presiden diselenggarakan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat propinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk tingkat kota). Pemilu – baik pileg, pilpres, maupun pilkada - diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disingkat dengan “luber dan jurdil” (Suryadi dan Julmansyah, 2001:12).

Pelaksanaan pemilu di Indonesia, dalam hal ini pemilu legislatif, memiliki karakteristik yang sangat menarik untuk diteliti, terutama pemilu legislatif pada awal reformasi, yaitu pemilu legislatif tahun 1999. Perbedaan pelaksanaan

pemilu legislatif tahun 1999 dibandingkan dengan era Orde Baru terutama mengenai: (1)

peraturan jumlah peserta pemilu (masa Orde Baru diikuti oleh 3 OPP, sedangkan pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai/multi partai); dan (2) keanggotaan Komisi Pemilihan Umum atau KPU (masa Orde Baru, anggota KPU dihuni oleh kalangan birokrat, sedangkan pada tahun 1999 diisi oleh kalangan partai politik dan independen). Selain itu, pemilu legislatif tahun 1999 merupakan dasar dibukanya “kran” pelaksanaan demokrasi yang sangat demokratis setelah sekian lama “dikerangkeng” oleh sistem pemilu legislatif rezim Orde Baru.

Partisipasi politik dari rakyat sebagai pemilih sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif. Rakyat diminta untuk memberikan suara pada partai dukungan masing-masing. Partisipasi politik masyarakat merupakan tonggak terlaksananya pemilu legislatif yang lancar, aman, dan damai. Tanpa adanya partisipasi politik masyarakat, maka dipastikan pemilu legislatif tidak akan berjalan sesuai dengan harapan (Mujani, 2007:29).

Penulisan ini ingin melihat tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan. Indikator untuk menentukan tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar atau DPT (daftar pemilih tetap).

Selanjutnya, Huntington dan Nelson (1990:24) menyatakan bahwa status sosial dan ekonomi akan sangat menentukan tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Lindenfeld (1961:34) juga menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi (asing) dari kehidupan politik.

Orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Berdasarkan pendapat Huntington, Nelson, dan Lindenfeld di atas, maka secara teoritis, dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan yang berada pada taraf kehidupan ekonomi menengah ke bawah adalah rendah. Akan tetapi, bagaimana kenyataannya pada masyarakat nelayan Sungai Limau? Bagaimanakah tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Limau yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah pada pemilu legislatif tahun 1999? Hal inilah yang akan diungkap dalam penulisan ini.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan dan menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat. Partisipasi politik merupakan aplikasi nyata dari penyelenggaraan kekuasaan politik rakyat. Di negara-negara demokratis, tingginya partisipasi menunjukkan tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang politik. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang relatif rendah menunjukkan bahwa warga negara banyak yang tidak mengerti tentang politik dan mereka tidak mau terlibat dalam politik (Soebagio, 2008:3).

Partisipasi politik meliputi pengertian yang luas, mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang lebih mengenai partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1990:9) dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* memaknai partisipasi politik sebagai berikut:

“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be

individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”.

(Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif).

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang di pandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini memang tidak membedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom (dari dalam diri sendiri) atau mobilisasi (dipengaruhi oleh orang lain atau kekuasaan lain).

Sementara itu, Damsar (2010:180) mengutip pendapat Keith Fauls memberikan batasan mengenai partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu/kelompok ke dalam proses pemerintahan”. Selanjutnya, Muiz (2000:46) mengutip pendapat Khamisi memberikan pengertian secara luas mengenai partisipasi politik, yaitu: “Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independen, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan

pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri.

Sifat alami dari partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Namun, Huntington dan Nelson – berdasarkan definisi yang diberikan – menyatakan bahwa partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Bentuk Partisipasi Politik

Perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya. Bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik. Damsar (2010:186) mengutip pendapat Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: (1) Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, (2) Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 : Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
a. Pemberian suara	a. Pengajuan petisi (surat permohonan)
b. Diskusi	

<p>politik</p> <p>c. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</p> <p>d. Komunikasi dengan pejabat politik dan administrative</p>	<p>pada pemerintah)</p> <p>b. Berdemonstrasi</p> <p>c. Konfrontasi</p> <p>d. Mogok</p> <p>e. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengeboman, pembakaran)</p> <p>f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya, dan revolusi</p>
--	---

Sumber: Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 186.

Kajian ini memfokuskan pada bentuk partisipasi politik berupa kegiatan pemilihan (berdasarkan pendapat Huntington dan Nelson) atau partisipasi politik berupa pemberian suara (berdasarkan pendapat Almond). Hal ini dapat dilihat dari kajian yang menitikberatkan pada kegiatan para informan penelitian (nelayan Sungai Limau) yang ikut serta memberikan suara dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 1999.

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif

Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir melalui pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Waridah, 2003:7).

Pementara itu, pemilu legislatif merupakan pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan

duduk di DPR, DPD (untuk mengisi keanggotaan MPR), dan DPRD. Pelaksanaan pemilu legislatif tahun 1999 berlandaskan pada 3 (tiga) undang-undang (UU) politik baru. UU yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Presiden Habibie adalah UU tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 1999 sebelum diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2002 dan diubah lagi menjadi UU No. 2 Tahun 2008), UU tentang Pemilihan Umum (UU No. 3 Tahun 1999 sebelum diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif dan UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), dan UU tentang Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU No. 4 Tahun 1999 sebelum diubah menjadi UU No. 22 Tahun 2003).

Lahirnya UU politik ini menyebabkan kehidupan politik di Indonesia berubah. Hal itu memicu munculnya partai-partai politik yang jumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 112 partai politik lahir, tetapi hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu legislatif tahun 1999. Lembaga pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan lagi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Keanggotaan KPU terdiri atas wakil dari pemerintah dan partai politik peserta pemilu (Waridah, 2003:83).

Bandingkan dengan keanggotaan LPU, dimana untuk mengisi personalia pegawai sekretariat LPU diambilkan dari pegawai Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Kehakiman (Depkeh), Departemen Penerangan (Deppen), Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang sarat dengan unsur kekuasaan (Machmud, 1981:34).

Masyarakat Nelayan

Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni

suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009:27). Selanjutnya, Imron (dikutip oleh Subri, 2005:7) menyatakan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Pasal 6 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 15/Permen/M/2006, dinyatakan bahwa nelayan diartikan dengan “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Sementara itu, Pasal 7 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 15/Permen/M/2006 menyatkan bahwa masyarakat nelayan adalah “kelompok atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya ikan dan pembudi daya ikan kecil yang bertempat tinggal di sekitar kawasan nelayan”.

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan (Kusnadi, 2000:1). Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, dikutip oleh Kusnadi, 2000:2). Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok-kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Di Sumatera Barat, kawasan perikanan pantai meliputi 7 (tujuh) daerah kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan jumlah nelayan sejumlah 32.367 orang yang terdiri atas 24.373 orang nelayan tetap dan sisanya sebanyak 7.994 orang adalah nelayan musiman. Jumlah perahu penangkapan adalah 7.526 yang terdiri atas perahu tanpa motor yang berjumlah 4.399, perahu motor tempel yang berjumlah 1.696, dan kapal motor berjumlah 1.431 (Firial Marahudin, 2002, dikutip oleh Masri, 2010:47). Sementara itu, jumlah nelayan di Sungai Limau berjumlah 1.733 kepala keluarga dan masih menggunakan teknologi sederhana dalam menangkap ikan (Masri, 2010:48).

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*paradigma naturalistik*) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001:34). Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan *analisis deskriptif*, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu yang ada dalam suatu masyarakat (Moleong, 2001:35). Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun keterangan yang berdasarkan kejadian atau pengalaman yang telah berlangsung menyangkut tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan pada pemilu legislatif tahun 1999.

Penelitian ini dilakukan di Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Korong Pasir Baru dan Korong Sungai Sirah, yang merupakan daerah pantai dan letaknya terbentang memanjang dalam bentuk dataran sempit

dari barat ke timur dan diapit oleh lautan Hindia serta daerah perbukitan. Alasan pemilihan Kecamatan Sungai Limau sebagai lokasi penelitian adalah karena kecamatan ini memiliki jumlah nelayan yang banyak jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Informan dalam penelitian ini adalah para nelayan yang berdomisili di sepanjang pinggiran pantai Sungai Limau. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *snowball* (bola salju). Dengan demikian pencarian data baru akan berhenti dilakukan apabila peneliti telah menemukan jawaban penelitian, atau tidak ada lagi informasi baru yang ditemukan, dan/atau peneliti telah merasa puas dengan jawaban yang diperoleh.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Wawancara (*Interview*) terhadap informan penelitian, (2) observasi langsung ke lokasi penelitian, dan (3) dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data-data tertulis yang ada di lembaga yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Limau seperti KPU dan BPS Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen yang diperlukan seperti laporan perolehan suara pemilu tahun 1999, jumlah kontestan pemilu, dan data statistik kependudukan masyarakat nelayan Sungai Limau.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap sebagaimana versi Miles dan Huberman (1992:15) yaitu:

- (1) Pengumpulan data, dimana peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi,

- (2) Reduksi data, dimana peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama penulis melakukan observasi. Reduksi data ini penulis lakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses reduksi data yang dilakukan, peneliti berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang diperlukan, data yang dibuang (tidak diperlukan), dan data yang perlu analisis mendalam. Dengan cara inilah kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dan data tersebut langsung disajikan,

- (3) Sajian Data, dimana peneliti melakukan penyajian atas sekumpulan informasi yang tersusun. Selanjutnya data inilah yang kemudian peneliti tuangkan ke dalam penulisan tesis ini,

- (4) Penarikan Simpulan/Verifikasi data, dimana peneliti menarik kesimpulan dari hasil tulisan yang telah disusun dalam bentuk hasil penelitian yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

II. Hasil Penelitian

Kondisi Geografis Kecamatan Sungai Limau

Kecamatan Sungai Limau dilihat dari sisi astronomis, terletak pada posisi 0°10'-0°48' Lintang Selatan dan 99°37'-100°27' Bujur Timur dengan luas wilayah ± 70,38 km² atau ± 5,50% dari luas area Kabupaten Padang Pariaman. Secara Secara topografis, daerah ini terbagi

menjadi dua area, yaitu: *pertama*, area dataran rendah yang mencakup 35% dari seluruh wilayah Kecamatan Sungai Limau yang tersebar di wilayah bagian barat di sepanjang pantai. *Kedua*, area dataran tinggi yang meliputi 65% dari seluruh wilayah Kecamatan Sungai Limau dengan tekstur daerah yang bergelombang dan berbukit-bukit hingga ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut (*Padang Pariaman dalam Angka*, 1999:12).

Wilayah Kecamatan Sungai Limau beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin darat dan laut. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, mencapai 2.450 mm – 5.070 mm per tahun, dengan suhu berkisar antara 25,2°C hingga 30°C dan tingkat kelembaban udara antara 80-81% (*Padang Pariaman dalam Angka*, 1999:13).

Sebelum tahun 1999, saat Sumatera Barat masih menggunakan sistem pemerintahan desa (sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa), jumlah desa yang ada di Kecamatan Sungai Limau adalah 7 buah desa, yaitu Desa Pasar Sungai Limau, Desa Pilubang, Desa Kuranji Hilir, Desa Guguak Tinggi Kuranji Hilir, Desa Pasir Baru, dan Desa Koto Tinggi Kuranji Hilir. Setelah Sumatera Barat kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari pada tahun 2000 (sejalan dengan keluarnya Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari), desa kembali diganti menjadi nagari, dan nagari yang ada di Kecamatan Sungai Limau berjumlah 4 buah nagari, yaitu: Nagari Kuranji Hilir (juga meliputi Desa Pasar Sungai Limau), Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Nagari Guguak Tinggi Kuranji Hilir, dan Nagari Pilubang (juga meliputi Desa Pasir Baru).

Kondisi Demografis Kecamatan Sungai Limau

Luas Kecamatan Sungai Limau ± 70,38 km², dengan persentase ± 5,50% dari luas area Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah KK di Kecamatan Sungai

Limau ± 9.592 sedangkan KK nelayan ± 1.733. Ini menandakan persentase yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Sungai Limau ± 29,97% KK (*Data Monografi Kecamatan Sungai Limau*, 1999:1).

Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Limau pada tahun 1999 tercatat ± 41.109 jiwa, yang terdiri dari ± 19.098 jiwa laki-laki dan ± 22.011 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak ± 9.592. Kepadatan Penduduk 158 jiwa/km² (*Kecamatan Sungai Limau dalam Angka*, 1999:1). Jumlah penduduk terbanyak berada di Nagari Pilubang, yakni 14.657 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.654. Jumlah penduduk terendah berada di Nagari Guguak Tinggi Kuranji Hilir, yakni 4.569 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.288.

Sementara itu, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Sungai Limau pada tahun 1999 tercatat sebanyak ± 7.654 jiwa atau ± 1.733 KK seperti yang tergambar dalam tabel 2.

Tabel 2: Jumlah Nelayan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 1999 Per Kecamatan

N o	Kecamaan	Jumlah Nelayan (Jiwa)	Jumlah Nelayan (KK)
1	Kuranji Hilir	2.620	565
2	Koto Tinggi Kuranji Hilir	952	178
3	Guguak Tinggi Kuranji Hilir	1.010	185
4	Pilubang	3.072	805
	Jumlah	7.654	1.733

Sumber: *Padang Pariaman Dalam Angka 1999*

Berdasar tabel 2, terlihat bahwa jumlah nelayan terbanyak berada di Nagari Pilubang dengan total 3.072 jiwa (805 KK), disusul oleh Nagari Kuranji Hilir

dengan jumlah 2.620 jiwa (565 KK), kemudian Nagari Guguak Tinggi Kuranji Hilir dengan jumlah 1.010 jiwa (185 KK). Terakhir adalah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir dengan jumlah nelayan 952 jiwa (178 KK).

Kondisi Perekonomian Masyarakat Sungai Limau

Perekonomian Kecamatan Sungai Limau masih didominasi oleh sektor pertanian walaupun perannya di dalam Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) cenderung turun. Sektor pertanian juga menjadi yang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yang menjadi andalan utama (*prime mover*) bagi pengembangan perekonomian masyarakat (*Kabupaten Padang Pariaman Strategi dan Potensi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, 2008:2). Kontribusi untuk sektor perkebunan sangat potensial dikembangkan, pengaruh iklim, letak geografis, tingkat kemiringan lahan, tekstur dan jenis tanah sangat cocok untuk pengembangan perkebunan seperti coklat, salak, karet, kelapa, vanili, dan gambir (*Data Monografi Kecamatan Sungai Limau*, 1999:7).

Kecamatan Sungai Limau tercatat memiliki lahan sawah seluas 3.064 hektar di tahun 1999. Sebanyak 77,75 persen dari total luas lahan sawah tersebut sudah menggunakan irigasi sebagai sistem pengairan, sedangkan sisanya masih merupakan sawah non irigasi. Dengan jumlah lahan sawah seluas 3.064 hektar tersebut, Kecamatan Sungai Limau pada tahun 1999 dapat memproduksi padi sebanyak 26.120,11 ton, meningkat sebesar 1,67 persen dibanding tahun sebelumnya. (*Data Monografi Kecamatan Sungai Limau*, 1999:8).

Kecamatan Sungai Limau juga memiliki potensi yang cukup besar di sub sektor perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut. Hal ini tercermin dari wilayah Kecamatan Sungai Limau yang terletak di pinggir Samudera

Indonesia. Disamping itu potensi perikanan darat juga cukup besar, baik yang terdapat di perairan umum, budidaya di kolam, maupun mina padi.

Secara umum produksi ikan darat selama tahun 1999 mengalami peningkatan dibanding produksi pada tahun 1998, yaitu dari 9.899,2 ton menjadi 10.799,1 ton. Sementara itu, produksi perikanan laut di Kecamatan Sungai Limau selama tahun 1999 berjumlah 10.101,5 ton dengan nilai produksi sebesar 64,724 milyar rupiah. Produksi perikanan laut tahun 1999 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi ikan laut pada tahun 1998 yang berjumlah 11.296 ton tetapi dengan nilai produksi yang lebih rendah yaitu sebesar 61,715 milyar rupiah (*Kabupaten Padang Pariaman dalam angka*, 2000:14).

Komoditas laut yang lainnya yang khas di Kecamatan Sungai Limau khususnya dan di Kabupaten Padang Pariaman umumnya adalah ikan teri (ikan-ikan kecil yang direbus dengan garam) lalu di jemur dengan panas matahari yang berkualitas bagus, terkenal dengan teri super dengan aromanya yang khas dan warnanya tetap putih bersih walaupun direbus dan dicuci. Selain di jual ke Padang juga dibawa orang pedagang teri sampai ke Pekan Baru. Satu lagi komoditi laut yang menjadi ciri khas Kecamatan Sungai Limau yaitu *lauak budu* (bahasa minang) atau ikan budu, yaitu ikan-ikan besar seperti tenggiri, tongkol yang dikeringkan dengan rentang waktu yang agak lama dari ikan teri kadang sampai berminggu-minggu untuk menghasilkan aroma yang sedap dan harum baunya.

III. Pembahasan

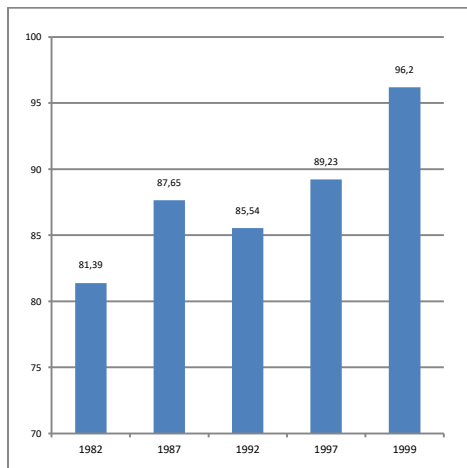
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Sungai Limau pada Pemilu Legislatif Tahun 1999

Pemilu legislatif tahun 1999 dikatakan merupakan “gerbang” terbukanya pintu demokrasi di Indonesia.

Rakyat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman mengenai kuantitas tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Limau, khususnya di Jorong Pasir Baru dan Jorong Sungai Sirah, diperoleh data bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan di kedua lokasi penelitian itu dalam pemilu legislatif tahun 1999 (khusus pemilu legislatif untuk daerah tingkat II Kabupaten Padang Pariaman) terbilang tinggi (lebih dari 90%). Hal ini dapat dibuktikan dalam pengolahan data hasil penelitian yang tergambar pada Gambar 1.

Gambar 1

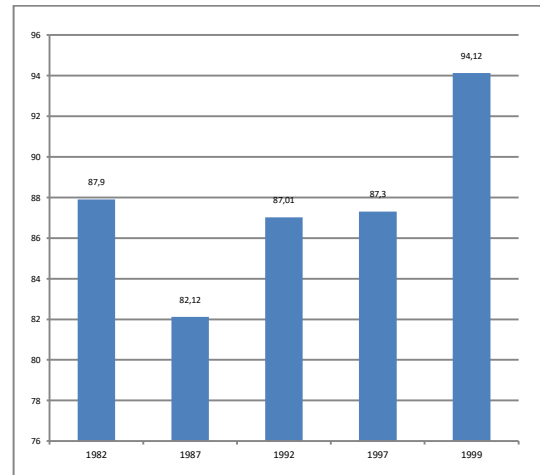
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Sungai Sirah Pada Pemilu Legislatif Tahun 1982 - 1999 (Pemilihan DPRD Daerah Tingkat II Kab. Padang Pariaman)



Sumber: Diolah dari data hasil penelitian di KPU Kabupaten Padang Pariaman, 2012

Gambar 2

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Pasir Baru Pada Pemilu Legislatif Tahun 1982 - 1999 (Pemilihan DPRD Daerah Tingkat II Kab. Padang Pariaman)



Sumber: Diolah dari data hasil penelitian di KPU Kabupaten Padang Pariaman, 2013

Berdasar data pengolahan hasil penelitian pada gambar 1 dan 2, dapat dikatakan bahwa kondisi sosial ekonomi yang rendah tidak membuat masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru “malas” dan enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 1999. Sebaliknya, kondisi tersebut memacu keinginan masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 1999. Bahkan partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru pada pemilu legislatif tahun 1999 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi mereka pada pemilu masa Orde Baru yang cenderung dimobilisasi penguasa/rezim saat itu.

Terbukti bahwa pada pemilu legislatif tahun 1999, tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah mencapai 96,2%, sedangkan sebelumnya tidak pernah mencapai angka 90%. Demikian juga dengan partisipasi politik

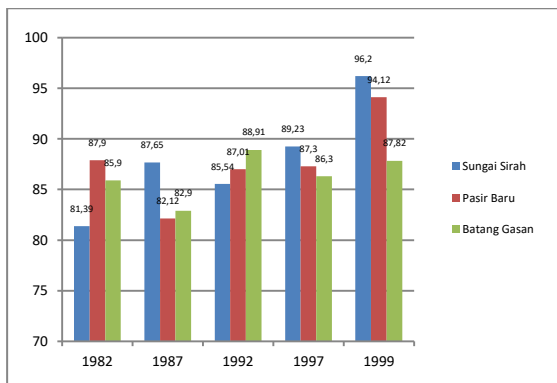
masyarakat nelayan Pasir Baru yang mencapai 94,12%, dan pemilu sebelumnya tidak pernah mencapai angka 90%.

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, maka tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Limau berbeda dengan tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang sama, seperti pada masyarakat nelayan di Batang Gasan dan Batang Anai.

Perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru dengan masyarakat nelayan Batang Gasan pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 1999 dapat dilihat dalam gambar 3.

Gambar 3

Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Sungai Limau dengan Masyarakat Nelayan Batang Gasan pada Pemilu Legislatif Tahun 1999 (Pemilihan DPRD Daerah Tingkat II Kab. Padang Pariaman)



Sumber: Diolah dari data hasil penelitian di KPU Kabupaten Padang Pariaman, 1999

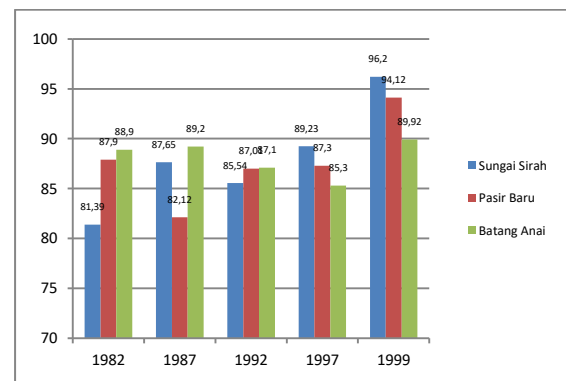
Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Limau di daerah Sungai Sirah dan Pasir Baru lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat nelayan Batang Gasan

pada pemilu legislatif tahun 1999, yaitu 96,2% (Sungai Sirah), 94,12% (Pasir Baru), dan 87,82% (Batang Gasan). Akan tetapi, jika dilihat ke belakang, partisipasi politik masyarakat nelayan Batang Gasan tinggi pada pemilu tahun 1992 (88,91%) dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah (85,54%) dan Pasir Baru (87,01%).

Selanjutnya, perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru dengan masyarakat nelayan Batang Anai pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 1999 dapat dilihat dalam gambar 4.

Gambar 4

Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Sungai Limau dengan Masyarakat Nelayan Batang Anai pada Pemilu Legislatif Tahun 1999 (Pemilihan DPRD Daerah Tingkat II Kab. Padang Pariaman)



Sumber: Diolah dari data hasil penelitian di KPU Kabupaten Padang Pariaman, 1999

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat nelayan Batang Anai pada pemilu legislatif tahun 1999, yaitu 96,2% (Sungai Sirah), 94,12% (Pasir Baru), dan 89,92% (Batang Anai). Akan tetapi, jika dilihat ke belakang,

partisipasi politik masyarakat nelayan Batang Gasan tinggi pada pemilu tahun 1982 (88,9%), 1987 (89,2%), dan 1992 (87,1%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah (81,39%, 87,65%), dan 85,54%) dan Pasir Baru (87,9%, 82,12%, dan 87,02%).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Limau, khususnya di Sungai Sirah dan Pasir Baru lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan di Batang Gasan dan Batang Anai pada pemilu legislatif 1999 yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sama. Walaupun jika dilihat ke belakang, pada pelaksanaan pemilu era Orde Baru, tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru ada yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan lainnya, akan tetapi jika dikaitkan dengan pemanfaatan kebebasan dalam memilih yang diberikan oleh era Reformasi, maka masyarakat nelayan Sungai Sirah dan Pasir Baru yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan pada bagian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan Sungai Limau pada pemilu legislatif tahun 1999 secara kuantitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik mereka pada periode pemilu sebelumnya, yaitu 96,20% di Sungai Sirah dan 94,12% di Pasir Baru. Walaupun kecenderungan yang terjadi bahwa pada masyarakat yang termasuk golongan menengah ke bawah, tingkat partisipasi politiknya rendah, akan tetapi pada masyarakat nelayan Sungai Limau, walaupun mereka termasuk golongan menengah ke bawah, tingkat partisipasi politik mereka tinggi. PAN dan PBB

merupakan partai yang mendominasi pilihan masyarakat nelayan Sungai Limau.

DAFTAR PUSTAKA

- Machmud, Amir. *Lembaga Pemilihan Umum (Himpunan Keputusan Mendagri: Ketua LPU Mengenai Teknis Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD I, DPRD II Tahun 1982)*. Jakarta: Lembaga LPU, 1981.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2009.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lindenfeld, Frank. *An Analysis of Political Involvement*. Columbia University, 1961.
- Subri, M. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Masri. 2010. "Identifikasi Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Nelayan Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyediaan Perumahan Pemukiman". *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Miles dan Huberman. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Muiz, Ruslan Ustman Abdul. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Waridah, Siti, dkk. *Sejarah Nasional dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Soebagio. “Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia”. *Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, Vol. 12, No. (2008), hlm. 2.

Suryadi, Suhardi dan Julmansyah. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pengembangan Demokrasi: Kasus Legislasi Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sumbawa*. LP3S, 2001.